

ABSTRAK

Dalam praktik medis, hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada perjanjian terapeutik yang menuntut profesionalisme dan tanggung jawab dari dokter. Namun, dalam beberapa kasus terjadi sengketa hukum akibat dugaan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada pasien. Pembatasan tanggung jawab dokter dalam putusan MA Nomor 173/PK/Pdt/2017 memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam hubungan ini, baik bagi pasien maupun dokter dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pembatasan tanggung jawab dokter terhadap kerugian pasien pasca putusan MA Nomor 173 PK/Pdt/2017 serta dampaknya terhadap keseimbangan kedudukan antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab dokter dalam putusan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan terapeutik, di mana dokter lebih terlindungi secara hukum, sementara pasien sebagai pihak yang dirugikan akibat kesalahan medis cenderung kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Implikasi dari keputusan ini menunjukkan perlu adanya reformasi kebijakan hukum dalam pengaturan tanggung jawab dokter agar dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara hak pasien dan kewajiban dokter serta perlindungan yang memadai terhadap pasien tanpa mengurangi tanggung jawab profesi dokter. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam mengkaji sejauh mana pembatasan tanggung jawab dokter dapat melindungi pasien dan dokter secara berimbang, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebijakan hukum dalam kasus malpraktik medis di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Dokter, Perjanjian Terapeutik, Keseimbangan Hukum, Perlindungan Pasien

ABSTRACT

In medical practice, the relationship between doctors and patients is based on a therapeutic agreement that demands professionalism and responsibility from the doctor. However, in some cases, legal disputes arise due to alleged malpractice that causes harm to patients. The limitation of the doctor's liability in the Supreme Court Decision No. 173/PK/Pdt/2017 raises questions regarding justice in this relationship, both for the patient and the doctor in carrying out their duties. This study aims to analyze the legal implications of limiting the doctor's liability for patient losses after the Supreme Court Decision No. 173 PK/Pdt/2017, as well as its impact on the balance of positions between the doctor and patient in the therapeutic agreement. This research uses a normative legal method with an approach based on legislation, case law, and conceptual analysis. The data sources used are secondary data, including laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings of this study indicate that the limitation of the doctor's liability in this decision causes an imbalance in the therapeutic relationship, where doctors are more legally protected, while patients, as the harmed parties due to medical errors, tend to lose their right to receive fair compensation. The implications of this decision suggest the need for legal policy reform in the regulation of doctors' liability to create a more equitable balance between the rights of patients and the obligations of doctors, as well as adequate protection for patients without reducing the professional responsibility of doctors. This study is expected to provide insights into the extent to which the limitation of doctors' liability can protect both patients and doctors in a balanced way, as well as contribute to the development of legal policies in medical malpractice cases in Indonesia.

Keywords: Doctor's Liability, Therapeutic Agreement, Legal Balance, Patient Protection